

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	11
BAB III	
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	13
Pendapatan - LRA	13
Belanja	14
Beban	22
Aset	23
Kewajiban	31
Ekuitas Dana	34
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	35
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	37
BAB V	
PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk

menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui Rumah Susun Sederhana. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung dari ke tiga Retribusi diatas adalah sebesar Rp.1.934.965.000,- dari total anggaran perubahan sebesar Rp.2.175.000.000,- atau sekitar 89%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.375.000.000,-	1.286.841.000,-	94%
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	0,-	18.722.000,-	0%

3	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	800.000.000,-	629.402.000,-	79%
	JUMLAH	2.175.000.000,-	1.934.965.000,-	89%

b. Belanja

Alokasi dana APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp.43.523.334.969,- yang digunakan untuk membiayai 2 jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.43.270.892.933,- yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp.11.852.349.939,-
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.24.923.542.994,-
 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.200.000.000,-
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.252.442.036,-

Adapun Realisasi Belanja Daerah TA 2024 di DPRKPLH adalah sebesar Rp.41.342.475.877,- dengan rincian sebagai berikut: untuk Belanja Operasi sebesar Rp.41.092.202.157,- dan Belanja Modal sebesar Rp.250.273.720,-.

Bagan 3.1
Proporsi Belanja DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun Anggaran 2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRKPLH Tahun Anggaran 2024

Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terbagi dalam masing-masing Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten : Temanggung

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2024	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN			KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.469.879.000	10.469.518.341	99,997%	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.469.879.000	10.469.518.341	99,997%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	10.469.879.000	10.469.518.341	99,997%	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.010.076.140	946.483.302	94%	100%
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.010.076.140	946.483.302	94%	100%
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.010.076.140	946.483.302	94%	100%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	100%
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	100%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.757.561.989	12.513.598.866	98%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.845.144.939	11.669.704.195	99%	100%

	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.845.144.939	11.669.704.195	99%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.993.150	93.446.830	87%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.997.000	8.596.230	96%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	19.387.000	88%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.928.100	99,64%	100%
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.997.150	21.849.600	84%	100%
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	23.685.900	79%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.999.700	586.118.311	93%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.294.000	65%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	87.523.252	80%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.999.700	497.301.059	97%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.424.200	164.329.530	92%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	86.901.800	87%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.424.200	64.551.730	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	12.876.000	99%	100%
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	197.449.700	99%	100%
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000	47.789.550	96%	100%
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	47.789.550	96%	100%

	Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000	149.660.150	99,77%	100%
	Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	149.660.150	99,77%	100%
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	452.954.550	409.445.966	90%	100%
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	252.955.150	243.940.193	96%	100%
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	29.553.500	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	222.955.150	214.386.693	96%	100%
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	199.999.400	165.505.773	83%	100%
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	199.999.400	165.505.773	83%	100%
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.387.500.000	1.336.637.497	96%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.387.500.000	1.336.637.497	96%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.287.500.000	1.238.046.232	96%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000	98.591.265	99%	100%
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.738.800	31.575.583	88%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.738.800	31.575.583	88%	100%
	Sub. Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	35.738.800	31.575.583	88%	100%

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.738.800				
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	49.527.584	99%	100%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.527.584	99%	100%
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	49.527.584	99%	100%
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.127.499.700	7.520.958.149	82%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	9.127.499.700	7.520.958.149	82%	100%
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	307.126.444	77%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.912.499.700	1.514.071.383	52%	100%
	Sub. Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.815.000.000	5.699.760.322	98%	100%
	JUMLAH	43.523.334.969	41.342.475.877	95%	100%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya system pembayaran baru yaitu 60% Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan secara tunai/ CMS dan 40% melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah/ KKPD. Perijinan KKPD dari Bank Indonesia

yang lama turun, mengakibatkan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi untuk pembayaran belanja/ SPJ rutin kegiatan-kegiatan, sehingga hal ini mengganggu dalam penyerapan anggaran belanja rutin tiap bulannya. DPRKPLH baru dapat melaksanakan belanja dengan KKPD pada Bulan September 2024 setelah Bank Indonesia mengeluarkan ijin.

- b. Penggunaan SIPD RI Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI.

Kementrian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB No. 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah, menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah. Penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/ mandatory bagi semua pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung mewajibkan untuk penggunaan SIPD RI Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI. Dalam pengoperasian aplikasi SIPD modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan masih menemui berbagai kendala yaitu seringnya mengalami gangguan/ eror dalam pengoperasiannya sehingga sering tidak bisa di akses. Seringkali Bendahara ataupun Pengadministrasi Keuangan meng-akses atau mengoperasikan SIPD di luar jam kerja karena gangguan tersebut. Kendala lain yang sering juga di hadapi adalah pengguna kurang teliti dalam penginputan data, laptop/ PC yang tiba-tiba eror dan jaringan internet yang lambat atau tidak stabil. Dengan adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan penyerapan anggaran terganggu sehingga berdampak pada capaian program kerja.

- c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (terbatasnya personil yang mempunyai Sertifikat Barang/ Jasa dan terbatasnya personil pengelola kegiatan yang memahami prosedur ketentuan serta tahapan pengadaan barang/ jasa);
- d. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti:

- belum adanya gudang penyimpanan barang habis pakai (ATK, Cetak dsb) dan Barang Milik Daerah;
- masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat;
- masih kurangnya kendaraan roda 3 (tossa), roda 4 (pick up), roda 6 (truck) dan arm roll maupun alat berat lainnya didalam mendukung operasional kegiatan pertamanan, kebersihan kota, pengelolaan persampahan di TPS, TPS3R dan juga TPA;
- belum mempunyai garasi permanen untuk armada kebersihan, persampahan dan pertamanan;
- masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di bidang-bidang, UPT dan Sekretariat DPRKPLH;
- terdapat beberapa Alat Berat di TPA yang rusak, peralatan perkantoran dan juga kendaraan operasional yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan selama tahun 2024 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2024, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12), pendapatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui Rumah Susun Sederhana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Realisasi pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.62.686.500,-
	Jumlah Total	1.200.000.000	1.262.686.500	0,-	105%	

Realisasi pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampaha	1.375.000.000	1.286.841.000	88.159.000	94%	
2.	Retribusi	0,-	18.722.000	(18.722.000)	0%	

	Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus					
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	800.000.000	629.402.000	170.598.000	79%	
	Jumlah Total	2.175.000.000	1.934.965.000	240.035.000	89%	

Retribusi pelayanan persampahan tidak melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Adanya kelompok masyarakat/ desa yang mengelola sampah secara mandiri;
- Untuk penyesuaian tarif sesuai dengan Perda No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan ada kenaikan sebesar 60%;
- Bertambahnya layanan pengelolaan sampah desa ke TPA yang semula pada tahun 2021 sejumlah 133 desa/kelurahan, bertambah menjadi 215 desa/ kelurahan di tahun 2024. Akan tetapi adanya kenaikan pelayanan ini untuk penerimaan retribusi tidak mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan desa masih mengalami kendala tentang iuran di warga sehingga retribusi yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah belum sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2023.

Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus belum dianggarkan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru disahkan pada tahun 2023 dan juga akses jalan untuk pembuangan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Sanggrahan Kranggan tertutup sampah/ overloaded sampah. Untuk mendukung dan mensukseskan capaian Program Sanitasi Aman di Kabupaten Temanggung, pelayanan penyedotan kakus darurat mulai beroperasi di bulan Juli 2024 dengan memakai paralon/ media darurat ke instalasi IPLT.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui Rumah Susun Sederhana tidak melampaui target yang ditetapkan, hal ini di karenakan tingkat okupansi hunian yang hanya terisi 275 unit dari total 446 unit (62,18%).

3.1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Realisasi anggaran belanja DPRKPLH Tahun Anggaran 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tahun Anggaran 2023

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.39.835.986.211,-	Rp.35.267.525.192,-
Belanja Modal	Rp.18.800.000,-	Rp.17.300.000,-
Jumlah	Rp.39.854.786.211,-	Rp.35.284.825.192,-

Tahun Anggaran 2024

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.43.270.892.933,-	Rp.41.092.202.157,-
Belanja Modal	Rp.252.442.036,-	Rp.250.273.720,-
Jumlah	Rp.43.523.334.969,-	Rp.41.342.475.877,-

Realisasi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2024	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.469.879.000	10.469.518.341	99,99%	360.659
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.469.879.000	10.469.518.341	99,99%	360.659
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	10.469.879.000	10.469.518.341	99,99%	360.659
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.010.076.140	946.483.302	94%	63.592.838
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.010.076.140	946.483.302	94%	63.592.838
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.010.076.140	946.483.302	94%	63.592.838
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	164.843.901
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	164.843.901
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.032.124.790	7.867.280.889	98%	164.843.901
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.757.561.989	12.513.598.866	98%	243.963.123
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.845.144.939	11.869.704.195	99%	175.440.744
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.845.144.939	11.869.704.195	99%	175.440.744
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.993.150	93.446.830	87%	13.546.320

	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.997.000	8.596.230	96%	400.770
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	19.387.000	88%	2.613.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.928.100	99,6%	71.900
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.997.150	21.849.600	84%	4.147.550
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	23.685.900	79%	6.313.100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.999.700	586.118.311	93%	40.881.389
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.294.000	65%	706.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	87.523.252	80%	22.476.748
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.999.700	497.301.059	97%	17.698.641
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.424.200	164.329.530	92%	14.094.670
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	86.901.800	87%	13.098.200
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.424.200	64.551.730	99%	872.470
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	12.876.000	99%	124.000
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	197.449.700	99%	2.550.300
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000	47.789.550	96%	2.210.450
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	47.789.550	96%	2.210.450
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000	149.660.150	99,7%	339.850
	Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	149.660.150	99,7%	339.850

6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	452.954.550	409.445.966	90%	43.508.584
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	252.955.150	243.940.193	96%	9.014.957
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	29.553.500	99%	446.500
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	222.955.150	214.386.693	96%	8.568.457
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	199.999.400	165.505.773	83%	34.493.627
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	199.999.400	165.505.773	83%	34.493.627
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.387.500.000	1.336.637.497	96%	50.862.503
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.387.500.000	1.336.637.497	96%	50.862.503
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.287.500.000	1.238.046.232	96%	49.453.768
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000	98.591.265	99%	1.408.735
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.738.800	31.575.583	88%	4.163.217
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.738.800	31.575.583	88%	4.163.217
	Sub. Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.738.800	35.738.800	31.575.583	88%	4.163.217
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	49.527.584	99%	472.416
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.527.584	99%	472.416

	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	49.527.584	99%	472.416
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.127.499.700	7.520.958.149	82%	1.606.541.551
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	9.127.499.700	7.520.958.149	82%	1.606.541.551
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	307.126.444	77%	92.873.556
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.912.499.700	1.514.071.383	52%	1.398.428.317
	Sub. Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.815.000.000	5.689.760.322	95%	115.239.678
	JUMLAH	43.523.334.969	41.342.475.877	95%	2.180.859.082

Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup :

1). Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2023		TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	11.859.764.241	11.738.194.173	11.852.349.939	11.673.529.195
Belanja Barang/Jasa	26.776.221.970	22.329.331.019	24.923.542.994	23.058.672.962
Belanja Hibah	0	0	200.000.000	200.000.000
Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000	1.200.000.000	6.295.000.000	6.160.000.000

Jumlah	39.835.986.211	35.267.525.192	43.270.892.933	41.092.202.157
--------	----------------	----------------	----------------	----------------

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.11.673.529.195 atau 95% dari anggaran sebesar Rp.11.852.349.939,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.23.058.672.962,- atau 93% dari anggaran sebesar Rp.24.923.542.994,-

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.200.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.6.160.000.000,- atau 98% dari anggaran sebesar Rp.6.295.000.000,-

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.41.092.202.157,- atau 95% dari anggaran sebesar Rp.43.270.892.933,-

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Belanja Modal DPRKPLH terdiri dari:

Belanja Modal	TA 2023		TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.800.000	17.300.000	252.442.036	250.273.720
Jumlah	18.800.000	17.300.000	252.442.036	250.273.720

Tahun Anggaran 2024 ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup hanya mempunyai anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.250.273.720,- atau 99% dari anggaran sebesar Rp.252.442.036,- .

3.1.3. Beban

Beban yang dimaksud dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayarannya dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, dan barang telah diterima. Beban per-31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.45.525.639.499,83..

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.934.965.000,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.934.965.000,00
7102	Retribusi Daerah-LO	1.934.965.000,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.305.563.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	629.402.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.934.965.000,00
8	BEBAN DAERAH	45.525.639.499,83
81	BEBAN OPERASI	45.451.470.549,83
8101	Beban Pegawai	11.667.396.648,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.084.658.540,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.507.428.108,00

810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.310.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	23.165.498.694,00
810201	Beban Barang	5.152.011.217,00
810202	Beban Jasa	6.794.382.234,00
810203	Beban Pemeliharaan	248.086.230,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	387.130.053,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.583.888.960,00
8105	Beban Hibah	200.000.000,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00
8106	Beban Bantuan Sosial	6.160.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	6.160.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.258.575.207,83
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.206.442.217,46
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.479.808.406,92
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	559.963.333,45
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	12.361.250,00
83	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	74.168.950,00
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	74.168.950,00
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	74.168.950,00
	Jumlah Beban	45.525.639.499,83
	Surplus Defisit LO	(43.590.674.499,83)

3.1.4. Aset

3.1.4.1. Aset Lancar

Aset Lancar yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.169.560.634,- dimana Aset Lancar terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan maupun Bendahara

Pengeluaran, Piutang (Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya) dan Persediaan Habis Pakai. Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.43.180.031,- dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023. Perincian Aset Lancar tersaji sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2024
Kas	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Persediaan Habis Pakai	Rp.212.740.665,-	Rp.169.560.634,-
Jumlah	Rp.212.740.665,-	Rp.169.560.634,-

3.1.4.1.1. Kas

	TA 2023	TA 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Penerimaan

- Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun tunai) yang berasal dari pendapatan retribusi persampahan/kebersihan yang sah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,-.

- Kas di Bendahara Penerimaan -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro Bendahara Penerimaan, setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Jadi saldo kas di Bendahara Panerimaan-Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,-.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas di Bendahara Pengeluaran -SKPD

Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/ UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp.44.591.396,- yang terdiri dari UYHD Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp.4.485.059,- dengan STS No.04/ BPeI/ DPRKPLH/ XII/ 2024 dan UYHD Tambahan Uang Persediaan (TU) sebesar Rp. 40.106.337,- dengan STS No. 05/ BPeI/ DPRKPLH/ XII/ 2024. Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp. 0,-.

- Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro otomatis langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah di setiap akhir bulan. Jadi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,-.

3.1.4.1.2. Piutang

Tidak terdapat piutang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, baik berupa piutang pajak, piutang retribusi maupun piutang lainnya. Untuk Piutang Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan piutang lainnya per tanggal 31 Desember 2024, adalah Rp.0,- .

	TA 2023	TA 2024
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

3.1.4.1.3. Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. Persediaan habis pakai berupa Perabot kantor/ Alat tulis kantor dan bahan kimia/ bahan lainnya. Saldo Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan :	TA 2023	TA 2024
-Perabot kantor/ alat tulis kantor	Rp.2.803.700,-	Rp.2.803.700,-
- Bahan kimia / bahan lainnya	Rp.82.371.965,-	Rp.115.515.934,-
-Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat	Rp.127.565.000	Rp.51.241.000,-
Jumlah Persediaan	Rp.212.740.665,-	Rp.169.560.634,-

3.1.4.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024, tersaji sebagai berikut :

	Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2023	Realisasi Belanja Modal TA 2024	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar/ Reklas	Nilai Aset Tetap TA 2024
A	Tanah	18.837.138.883	-	1.183.982.985	436.632.000	19.584.489.869

B	Peralatan dan Mesin	23.151.824.892	250.273.720	-	1.470.000	23.400.628.612
C	Gedung dan Bangunan	108.774.542.346	-	14.917.375.908	-	123.691.918.254
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.379.598.701	-	-	-	13.379.598.701
E	Aset Tetap Lainnya	1.080.230.700	-	-	105.057.200	975.173.500
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	47.622.000	-	-	47.622.000	0,-
	JUMLAH	165.270.957.522	250.273.720	16.101.358.894	154.149.200	181.031.808.936

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.181.031.808.936,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan asset dari realisasi Belanja Modal TA 2024, mutasi masuk dan mutasi keluar, reklas antar KIB, beserta penghapusan..

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2024 sebesar Rp.18.837.138.883,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Tanah	Rp.18.837.138.883,-	Rp.19.584.489.869,-

Nilai tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 mengalami perubahan, yaitu mutasi masuk dari Pengelola Barang Milik Daerah yang berupa Embung Kledung senilai Rp.1.183.982.986,- dan mutasi keluar ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) berupa tanah persil Ngipik Pringsurat senilai Rp.436.632.000,-.

b. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Peralatan dan Mesin	Rp.23.151.824.892,-	Rp.23.400.628.612,-

Nilai peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan aset berupa Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp.250.273.720,- dan reklas ke barang ekstrakomtabel dan barang persediaan habis pakai senilai Rp.1.470.000,-. Berikut dibawah ini perincian penambahan aset dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024:

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 Sekretariat:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000	1.770.000
BELANJA MODAL	1.800.000	1.770.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000	1.770.000
Belanja Modal Alat Pendingin	1.800.000	1.770.000
Kipas Angin Uap Humidifier 16" Krisbow model LB-F07, 1 unit		1.450.000
Kipas Angin Wall Fan Yasaka 2 unit		320.000
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.924.636	2.886.000
BELANJA MODAL	2.924.636	2.886.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.924.636	2.886.000
Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.924.636	2.886.000
4528900001 -ELD -19682865 Switch Hub D-link DGS 1024C & Kabel Jaringan		2.886.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 Bidang Tata Lingkungan:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.660.000	18.450.000
BELANJA MODAL	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu (Chainsaw	6.000.000	5.900.000

20 inc)		
- Mesin Chainsaw STIHL 20 inc, 45,4 cc		5.900.000
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	12.660.000	12.660.000
- Mesin Potong rumput gendong STIHL, 30,5 cc		7.400.000
- Gunting Pangkas Elektrik.wagner, WH650, 22,5 cc, 1 unit		4.000.000
- Gunting Taman Besar IGM 10 unit , @115.000		1.150.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 di UPT. Rusunawa:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	18.660.000	18.450.000
BELANJA MODAL	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.500.000	9.500.000
Belanja Modal Pompa ADK Electric Motor 2 unit	10.545.000	10.540.000
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	195.890.000	194.785.520
- Belanja Modal Pemasangan Instalasi Listrik (Pemasangan TOKEN) Pemasangan listrik token 900 watt, Hexing (HXE 118- KP)114 unit		
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi, Bosch, Demolition Hammer	4.440.000	4.350.000
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools); Kunci Pas dan Kunci Ring, ISKU	1.110.000	1.100.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Tangga Teleskopik, Stadex, 2 unit	3.463.200	3.463.200
Belanja Modal Peralatan Studio Audio, UPS Apc, 6 unit	4.129.200	4.050.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 di UPT. Laboratorium:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	8.880.000	8.879.000

BELANJA MODAL	8.880.000	8.879.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.880.000	8.879.000
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	8.880.000	8.879.000
Elektroda pH Spesifikasi : WTW/2AA312 Model pH 3310 Set 2	5.550.000	5.549.000
Elektroda pH Meter Spesifikasi : Ohous meter, ST320 pH/ATC	3.330.000	3.330.000

Jumlah Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.250.273.720,-. Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat barang yang harus di *reklas* keluar dari Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) ke barang persediaan habis pakai dan Ekstrakomtabel.

Reklas Peralatan dan Mesin ke Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Gunting Taman Besar IGM 10 unit , @115.000	1.150.000
	Jumlah reklas ke Barang Persediaan	1.150.000

Reklas Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	- Kipas Angin Wall Fan Yasaka 2 unit	320.000
	Jumlah reklas ke Barang Persediaan	320.000

Kemudian total jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah:

Peralatan dan Mesin TA 2023	Rp.23.151.824.892,-
Realisasi Belanja Modal 2024	Rp.250.273.720,-
Reklas BM ke Barang Persediaan	Rp.1.470.000,-
JUMLAH NILAI PERALATAN DAN MESIN TA 2024	Rp. 23.400.628.612,-

c. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Gedung dan Bangunan	Rp.108.774.542.346,-	Rp.123.691.918.254,-

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami perubahan karena adanya mutasi masuk berupa hibah barang milik negara yang berupa Rumah Susun berlokasi di Jalan Raya Kranggan Pringsurat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Hibah barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 796/ BA/ Dr/ 2024 yang merupakan lampiran dari Naskah Hibah BMN antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan P.J. Bupati Temanggung Nomor 796/ PKS/ Dr/ 2024 tanggal 8 Juli 2024. Hibah berupa Rumah Susun dengan nilai perolehan sebesar Rp.14.917.375.908,- dan tahun perolehan di tahun 2019.

No	Uraian	Nilai
1	Rumah Susun Pemerintah Kabupaten Temanggung, Lokasi di Jalan Raya Kranggan Pringsurat Kecamatan Kranggan, Tahun perolehan 2019.	14.917.375.908
	Jumlah mutasi masuk	14.917.375.908

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.379.598.701	13.379.598.701

Nilai jalan, irigasi dan Jaringan tidak mengalami perubahan.

e. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Aset Tetap Lainnya	1.080.230.700	975.173.500

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2024 mengalami perubahan karena adanya penghapusan dan reklas ke Aset Lainnya. Penghapusan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
	PENGHAPUSAN TANAMAN sebagai berikut:	
1	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/821 Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pohon Ayoman Jalan pada Ruas Jalan Lungge, Jalan Sroyo dan Jalan Muntung- Jumprit dari Daftar Pengguna pada DPRKPLH Kab. Temanggung.	3.390.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2012, 1 batang	690.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 2 batang	200.000
	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 5 batang	2.500.000
2	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/2129 Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kayu Pohon Ayoman dari Daftar Pengguna pada DPRKPLH Kab. Temanggung.	7.069.950
	Tanaman Keras Johar tahun 2011, 7 batang	700.000
	Tanaman Hias Azalea, Sirih Belanda dsb tahun 2011, 6 batang	156.000
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dsb tahun 2010, 14 batang	105.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2012, 3 batang	300.000
	Tanaman Hias Pucuk Merah, Bougenville dsb tahun 2010, 54 batang	999.000
	Tanaman Keras Perdu tahun 2013, 1 batang	9.950
	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 10 batang	4.500.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 1 batang	100.000
	Tanaman Keras Suren tahun 2011, 2 batang	200.000
3	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1041 Tahun 2024, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pohon Ayoman dari Daftar Pengguna pada DPRKPLH Kab. Temanggung.	16.087.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 12 batang	1.200.000
	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 26 batang	13.000.000
	Tanaman Keras Trembesi tahun 2009, 1 batang	425.000
	Tanaman Keras Johar tahun 2011, 6 batang	600.000
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dsb tahun 2010, 4 batang	30.400
	Tanaman Hias Pucuk Merah, Bougenville dsb tahun 2010, 9 batang	165.600
	Tanaman Hias Pucuk Merah, Bougenville dsb tahun 2010, 36 batan	666.000
	Jumlah penghapusan	26.546.950

Reklas KIB E, Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Video LH yang ditampilkan di Videotron Alun-Alun Temanggung	39.100.000
2	Tanaman (LHI), terdiri dari:	39.410.250

	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011 dilokasi Kranggan- Lungge	9.700.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011 dilokasi Kaloran, Jragan	60.250
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dsb tahun 2010 dilokasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Tlogorejo dan Walitelon	29.650.000
	Jumlah reklas	78.510.250

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Konstruksi dalam pengerjaan	47.622.000	0,-

Konstruksi dalam Pengerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 47.622.000,- yang berupa Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan Kranggan ini mengalami perubahan karena penghapusan.

No	Uraian	Nilai
1	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1911 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024	47.622.000
	DED Perluasan TPA Sanggrahan Kranggan	47.622.000
	Jumlah Penghapusan	47.622.000

Jadi nilai total Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebesar Rp.181.031.808.936,- (sebelum penyusutan).

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Aset Tetap	165.270.957.522	181.031.808.936

3.1.4.3. Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.354.849.450
	Aset Lain-lain	1.201.957.200	1.280.487.450
	Aset Tidak Berwujud	49.445.000	74.382.000

Nilai Aset lainnya pada tahun 2024 mengalami perubahan sebesar Rp.1.354.849.450,-, dimana terdapat mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

No	Uraian	Nilai
1	Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung ke Aset Tidak Berwujud, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Software Rusunawa No B/ 000574/ 030/ V/ 2024 tanggal 27 Mei 2024.	24.937.000
	Software Rusunawa, tahun beli 12 Desember 2019	24.937.000
	Jumlah Mutasi Masuk	24.937.000

Selain mutasi masuk dari DPUPR juga terdapat reklas aset dari Aset Tetap Lainnya.

No	Uraian	Nilai
1	Video LH yang ditampilkan di Videotron Alun-Alun Temanggung	39.100.000
2	Tanaman (LHI), terdiri dari:	39.410.250
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011 dilokasi Kranggan- Lungge	9.700.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011 dilokasi Kaloran, Jragan	60.250
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dsb tahun 2010 dilokasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Tlogorejo dan Walitelon	29.650.000
	Jumlah total reklas	78.510.250

3.1.4.4. Properti Inventasi Tanah

Properti Investasi Tanah adalah properti tanah untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdapat 8 bidang Properti Investasi

Tanah di Ngipik Pringsurat seluas 13.969 m², dengan total nilai Rp.749.436.000,- dimutasi keluar ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

Jadi total jumlah Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) tahun 2024 dengan penyusutan adalah sebesar Rp.128.334.995.015,31.

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Aset Lancar	212.740.665	169.560.634
2.	Aset Tetap	165.270.957.522	181.031.808.936
	Akumulasi Penyusutan	47.362.287.640	52.951.065.429,69
3.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.354.849.450
	Akumulasi Penyusutan	1.232.860.325	1.270.158.575
4.	Properti Inventasi Tanah	749.436.000	0,-
	Jumlah Total Aset	118.889.388.422	128.334.995.015,3

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Properti Investasi Tanah)

3.1.5. Kewajiban

3.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s/d 31 Desember 2024 jumlah kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2025. Hutang belanja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.

Perincian hutang belanja pegawai:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2024,	341.500.737
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp.341.500.737,-	
2.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2024,	3.147.638
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp.3.147.638,-	
3.	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.625.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
	JUMLAH	365.273.375

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan Pertamanan, Tenaga Kebersihan Persampahan, Tenaga Keamanan/ Satpam dan Sopir untuk Bulan DESEMBER 2024:	399.104.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.45.404.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp.322.800.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp.29.100.000,-	

	- Belanja Jasa Tenaga Sopir Rp.1.800.000,-	
2.	Pembayaran Belanja Telepon, Listrik dan Air DPRKPLH, untuk Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2024;	7.776.831
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	- Telepon Rp.1.162.072,-	
	- Air Rp.1.869.000,-	
	- Listrik Rp.4.745.759,-	
3.	Pembayaran Air UPT. Rusunawa untuk Rusunawa, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2024;	3.725.600
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	- Belanja Tagihan Air	
4.	Pembayaran Listrik UPT. Rusunawa untuk Rusunawa, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2024;	6.197.236
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Belanja Tagihan Listrik	
5.	Pembayaran Listrik UPT. Rusunawa untuk Rusunawa, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2024;	3.070.612
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Belanja Tagihan Listrik	
	JUMLAH	419.874.279

Jadi Total Kewajiban jangka pendek adalah Rp.785.147.654,-

3.1.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Jadi Jumlah Total Kewajiban adalah Rp.785.147.654,- (Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang).

No	Kewajiban	TA 2023	TA 2024
1.	Hutang Belanja Pegawai	371.405.922	365.273.375
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	357.698.578	419.874.279
	Jumlah	729.104.500	785.147.654

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas DPRKPLH adalah kekayaan bersih DPRKPLH, yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban DPRKPLH. Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	118.160.283.921,87
2	Surplus / (Defisit) LO	(43.590.674.499,83
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	13.572.727.062,27
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	39.407.510.877,00
5	Ekuitas Akhir	127.549.847.361,31

Kemudian untuk saldo ekuitas per-31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2024
EKUITAS	118.160.283.921,87	127.549.847.361,31

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Pada CaLK per 31 Desember 2024 terdapat laporan komparasi anggaran, akuntansi dan penatausahaan periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Akuntansi - Penata - usahaan
		Akuntansi	Penatausahaan	
PUNGUT				
Utang PPh 21		141.091.673,00	141.091.673,00	0,00
Utang PPh 22		21.628.101,00	21.628.101,00	0,00
Utang PPh 23		18.130.533,00	18.130.533,00	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		21.611.852,00	21.611.852,00	0,00
Utang PPN Pusat		338.332.013,00	338.332.013,00	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		9.593.618,00	9.593.618,00	0,00
SETOR				
Utang PPh 21		141.091.673,00	141.091.673,00	0,00
Utang PPh 22		21.628.101,00	21.628.101,00	0,00
Utang PPh 23		18.130.533,00	18.130.533,00	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		21.611.852,00	21.611.852,00	0,00
Utang PPN Pusat		338.332.013,00	338.332.013,00	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		9.593.618,00	9.593.618,00	0,00
BELANJA DAERAH	43.523.334.969	41.342.475.877	41.342.475.877	0,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Gambaran Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. DPRKPLH ini menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Gerilya No. 20 Maron, Sidorejo (Laboratorium Tembakau), Kode Pos 56251, Telepon/ Faximili (0293) 4901569, Email: dprkplh.temanggungkab@gmail.com.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

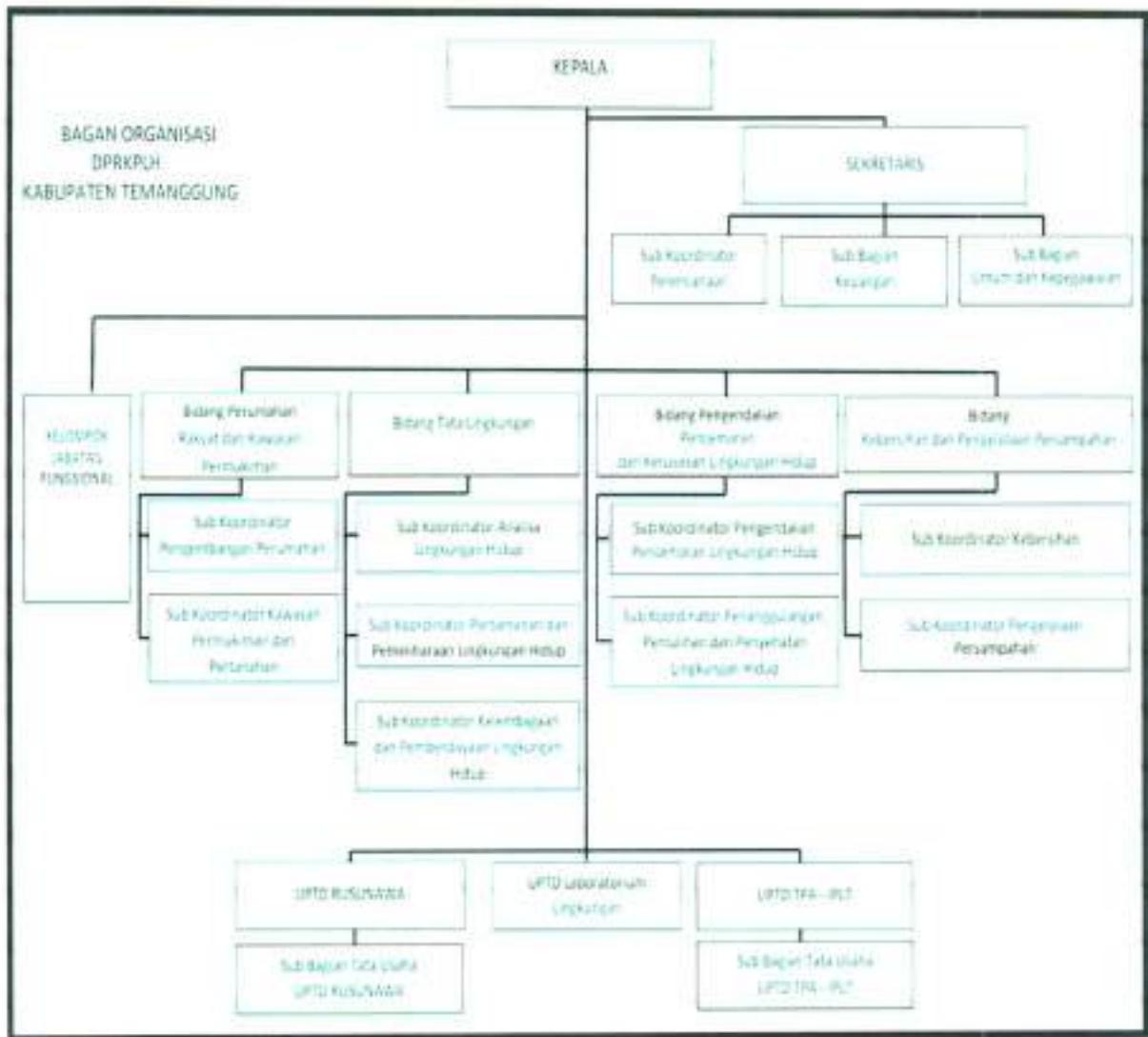
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
- g. Kepala UPTD Rusunawa;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- h. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Kepala UPTD TPA- IPLT;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Visi dan Misi

Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata **TENTREM, MAREM, dan GANDEM**. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup

berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif, dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya:
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Visi dan misi diatas maka DPRKPLH memenuhi misi ke 2 dan ke 3 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Misi 2: Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.
 - 1) Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Sasaran: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
 - 1) Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
 - 2) Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2024. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampaha	1.375.000.000	1.286.841.000	88.159.000	94%	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	0,-	18.722.000	(18.722.000)	0%	
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	800.000.000	629.402.000	170.598.000	79%	
	Jumlah Total	2.175.000.000	1.934.965.000	240.035.000	89%	

b. Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2024

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.43.270.892.933,-	Rp.41.092.202.157,-
Belanja Modal	Rp.252.442.036,-	Rp.250.273.720,-
Jumlah	Rp.43.523.334.969,-	Rp.41.342.475.877,-

2. Neraca

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1.	Aset Lancar	212.740.665	169.560.634
2.	Aset Tetap	165.270.957.522	181.031.808.936
	Akumulasi Penyusutan	47.362.287.640	52.951.065.429,69
3.	Aset Lainnya	1.251.402.200	1.354.849.450
	Akumulasi Penyusutan	1.232.860.325	1.270.158.575
4.	Properti Inventasi Tanah	749.436.000	0,-
	Jumlah Total Aset	118.889.388.422	128.334.995.015,3

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi Tanah dengan penyusutan)

3. Laporan Operasional

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.934.965.000,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.934.965.000,00
7102	Retribusi Daerah-LO	1.934.965.000,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.305.563.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	629.402.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.934.965.000,00
8	BEBAN DAERAH	45.525.639.499,83
81	BEBAN OPERASI	45.451.470.549,83
8101	Beban Pegawai	11.667.396.648,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.084.658.540,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.507.428.108,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.310.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	23.165.498.694,00
810201	Beban Barang	5.152.011.217,00
810202	Beban Jasa	6.794.382.234,00
810203	Beban Pemeliharaan	248.086.230,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	387.130.053,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.583.888.960,00
8105	Beban Hibah	200.000.000,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00
8106	Beban Bantuan Sosial	6.160.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	6.160.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.258.575.207,83
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.206.442.217,46
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.479.808.408,92
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	559.963.333,45
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	12.361.250,00

83	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	74.168.950,00
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	74.168.950,00
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	74.168.950,00
	Jumlah Beban	45.525.639.499,83
	Surplus Defisit LO	(43.590.674.499,83)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	118.160.283.921,87
2	Surplus / (Defisit) LO	(43.590.674.499,83)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	13.572.727.062,27
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	39.407.510.877,00
5	Ekuitas Akhir	127.549.847.361,31

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung


PRASODJO, SAq, MM
 NIP. 19660402 198903 1 013